

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu faktor penting yang berperan bagi kelangsungan hidup negara. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pajak merupakan salah satu sumber dalam penerimaan pendapatan negara, yang berperan sangat besar dalam pembangunan dan pembiayaan pengeluaran negara. Undang-Undang perpajakan telah mengatur mengenai kewajiban warga negara agar tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pemerintah selalu berupaya untuk menjadikan sistem perpajakan di Indonesia menjadi lebih baik. Perubahan sistem perpajakan dari tahun ke tahun merupakan salah satu upaya untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian negara dan meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Dengan perubahan undang-undang perpajakan di Indonesia, pemerintah berharap perekonomian Indonesia agar tetap stabil. Peraturan perpajakan mengatur Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, masih banyak Wajib Pajak yang melanggar Undang-undang perpajakan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak antara lain

tidak melakukannya pelaporan, pengurangan pajak, penggelapan pajak dengan cara memanipulasi laporan dan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan maupun Penyetoran Surat Pajak.

Apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran, maka akan dikenai sanksi administrasi ataupun sanksi pidana sebagaimana sudah diatur dalam pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007, bahwa setiap orang yang karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Dengan dikenai sanksi tersebut, maka wajib pajak akan merasa terhukum. Dengan adanya sanksi administrasi maupun pidana akan memberikan efek jera sehingga wajib pajak tidak mengulangi kesalahannya lagi. Meskipun demikian, wajib pajak selalu mencari cela-cela untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dengan wajib pajak mengulangi kesalahannya lagi, maka akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang lebih berat dan sanksi-sanksi tersebut akan menumpuk yang akan memberatkan wajib pajak.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), yang merupakan salah satu program yang dilaksanakan untuk memberikan pengampunan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalu. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 118 pasal 1 ayat 2 tahun 2016, Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi; menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang tertuang pada UU No 11 Tahun 2016 pasal 2.

Di berlakukannya *Tax Amnesty* pada tahun 2016 ini, pemerintah menginginkan kekayaan warga Indonesia di luar negeri ditarik ke tanah air (Repatriasi). Harapannya dana tersebut bisa di investasikan sehingga menjadi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, di ikuti dengan kenaikan daya beli. *Tax Amnesty* 2016 ini di lakukan dengan

cara mengungkapkan seluruh harta yang dimilikinya yang belum dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Salah satu kewajiban wajib pajak dalam UU No 28 pasal 8 Tahun 2007 adalah Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 pasal 18 Tahun 2016, bahwa wajib pajak wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Terakhir yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Terakhir yang disampaikan sebelum Undang-undang Pengampunan Pajak berlaku ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir atau akhir tahun 2015.

Dalam UU No 17 Tahun 2016 pasal 1, setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang pemerintah keluarkan. Pengampunan pajak(*tax amnesty*) diberikan kepada Wajib Pajak

melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Jadi Wajib Pajak dapat menggunakan hak pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) atau boleh tidak menggunakannya hak tersebut.

Salah satu tujuan *Tax Amnesty* adalah untuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. yang telah di atur dalam UU No 11 Tahun 2016.

Menurut PP No 118 Tahun 2016 pasal 44, terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir, Direktur Jenderal Pajak menemukan data atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atas harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan / atau informasi mengenai harta tersebut. Data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak, ditemukan paling lama dalam jangka 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai berlaku. Atas tambahan penghasilan, dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.

Oleh karena itu, Wajib Pajak boleh tidak mengikuti program ini maka dapat memilih pilihan lain selain *Tax Amnesty* yaitu pembetulan Surat

Pemberitahuan (SPT). Konsekuensi Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

*Tax Amnesty* Tahun 2016 adalah hal yang baru, sehingga belum ada yang melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, belum diketahui apakah pelaksanaan *Tax Amnesty* efisien atau tidak bagi Wajib Pajak. Maka penulis ingin meneliti tentang *Tax Amnesty* di wilayah Surakarta dengan mengambil studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang pernah memilih melakukan *Tax Amnesty*.

Dengan adanya program *Tax Amnesty* dari pemerintah maupun dengan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT), diharapkan Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak, dan tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu penelitian ini meneliti tentang simulasi apakah Wajib Pajak lebih melakukan *Tax Amnesty* atau memilih pembetulan SPT.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah ini adalah Apakah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan memilih dengan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) atau dengan melakukan program *Tax Amnesty*?

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada melakukan simulasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah melakukan *Tax Amnesty* pada gelombang 1 menurut UU No 11 Tahun 2016.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisien antara memilih *Tax Amnesty* dan melakukan Pembetulan SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada gelombang 1 menurut UU No 11 Tahun 2016.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan berguna:

### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan bagi para pelaku pendidikan khususnya dalam bidang akuntansi, dan bagi para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian terkait mengenai *Tax Amnesty* serta kebijakan perpajakan.

## 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui program yang dilaksanakan oleh pemerintah mengenai *Tax Amnesty* berdasarkan Peraturan Pemerintah.

## 3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi supaya pemerintah dapat mengevaluasi kinerja berkaitan dengan program *Tax Amnesty* serta menjadikan program *Tax Amnesty* ini menjadi lebih baik pada periode berikutnya.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian, maka disusun sistematika sebagai berikut:

**BAB 1 : PENDAHULUAN.** Bab pendahuluan berisi tentang gambaran singkat mengenai isi dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA.** Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang konsep dan teori yang melandasi penelitian ini yang mencakup landasan penelitian, berisi teori, hasil penelitian maupun pendapat ahli. Menjelaskan alur pemikiran dalam bentuk diagram maupun diskripsi.

**BAB 3 : METODE PENELITIAN.** Bab Metode Penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, desain penelitian, subyek penelitian,



teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), teknik analisis data dan validitas dan reliabilitas data

**BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.** Bab Hasil dan Pembahasan Penelitian membahas mengenai data yang digunakan, gambaran umum, analisis data serta pembahasan yang menjelaskan tentang hasil analisis

**BAB V : PENUTUP.** Bab Penutup berisi tentang semua kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan nantinya dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.